



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Balai Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Nnk pada tanggal 23 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 17 Juli 2014 di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah imam kampung bernama imam kampung, karena seluruh wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nasab Pemohon II beragama Kristen, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
 4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
 5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 37 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 27 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
 6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
 7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
 8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Bilal bin Heriyanto, umur 10 bulan;
 9. Bahwa sebelum menikah, para pemohon bekerja di Malaysia yang kemudian pada awal tahun 2014 para Pemohon dideportasi ke Nunukan, dan dokumen-dokumen para Pemohon tidak lengkap sehingga tidak dapat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
 10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 11. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini, untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon ini, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014 di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 6 Juni 2016 atas nama Heriyanto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPeL)** Nomor - tanggal 25 Agustus 2016 atas nama Nur Ain, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor - tanggal 29 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga Heriyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

4. **Surat Keterangan Kematian** nomor 140/944/PEM tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.4.**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 para pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Elektronik, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Sepupu Pemohon I, saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri yang menikah Pada tanggal 17 Juli 2014, yang melangsungkan akad nikah di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah imam kampung bernama imam kampung , karena seluruh wali nasab Pemohon II beragama Kristen, yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi pernikahan keduanya adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa Mahar pernikahannya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan antara para Pemohon, dan



sejak menikah, para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, dan keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan telah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena para pemohon bekerja di Malaysia yang kemudian pada awal tahun 2014 para Pemohon dideportasi ke Nunukan, dan dokumen-dokumen para Pemohon tidak lengkap sehingga tidak dapat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Saksi 2 para pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman para Pemohon, saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri yang menikah Pada tanggal 17 Juli 2014, yang melangsungkan akad nikah di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah imam kampung bernama imam kampung , karena seluruh wali nasab Pemohon II beragama Kristen, yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi pernikahan keduanya adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 (saksi kedua), dengan mahar pernikahannya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan antara para Pemohon, dan sejak menikah, para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, dan keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan telah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena para pemohon bekerja di Malaysia yang kemudian pada awal tahun 2014 para Pemohon dideportasi ke Nunukan, dan dokumen-dokumen para Pemohon tidak lengkap sehingga tidak dapat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.4., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dan **bukti P.2.**, berupa fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon II, dan keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan dua orang anak, satu orang anak bernama Nur Fadillah bin Andi Aco dan Muhammad Bilal bin Herianto di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.4.**, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Aco, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut bahwa Andi Aco sebagai suami Pemohon II telah meninggal dunia sejak tanggal 16 Maret 2013 di Tarakan karena sakit, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan bahwa para saksi hadir di pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014, yang melangsungkan akad nikah di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut, dan yang menjadi wali nikahnya adalah imam kampung bernama **imam kampung**, karena seluruh wali nasab Pemohon II beragama Kristen, yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi pernikahan keduanya adalah **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**, dengan mahar pernikahannya seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai dan telah di karuniai 1 orang anak sampai dengan sekarang, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 17 Juli 2014 di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah imam kampung bernama **imam kampung** , karena seluruh wali nasab Pemohon II beragama Kristen, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**, dengan mahar perkawinan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain, dan selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Bilal bin Heriyanto, umur 10 bulan;
- Bahwa sebelum menikah, para pemohon bekerja di Malaysia yang kemudian pada awal tahun 2014 para Pemohon dideportasi ke Nunukan, dan dokumen-dokumen para Pemohon tidak lengkap sehingga tidak dapat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia,



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini, untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon ini, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الد عوي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil",

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wali nasab Pemohon II yang beragama kristen, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama dalam *al-Iqna` fi Halli Alfazhi Abi Suja`* karangan Muhammad Khathib asy-Syarbini, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

الْقَوْلُ فِي شُرُوطِ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدَيْنِ (وَيَقْتَضِي الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ) الْمُعْتَبَرُونَ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ (إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ) بَلْ إِلَى أَكْثَرِ كَمَا سَيَأْتِي الْأَوَّلُ الْإِسْلَامُ) وَهُوَ فِي وَلِيِّ الْمُسْلِمَةِ إِجْمَاعًا

Artinya "Penjelasan mengenai syarat-syarat wali dan dua orang saksi. (Dan wali dan dua orang saksi) yang diakui sebagai kesahan nikah membutuh setidaknya enam syarat bahkan lebih banyak sebagaimana yang dijelaskan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat pertama adalah beragama Islam, dan syarat beragama Islam itu adalah syarat wali untuk perempuan muslimah sebagaimana ijma` para ulama`

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, namun dalam fakta hukum persidangan, wali nasab Pemohon II beragama kristen, sehingga wali nasab tersebut tidak dibolehkan untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari : a. wali nasab, b. wali hakim, dan Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau qhaib atau adhal atau enggan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah perbuatan halal yang dicintai Allah SWT, yang sedapat mungkin dilakukan oleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi dengan kondisi mempertahankan untuk tidak menikah karena alasan orang tua kandung sebagai wali beragama kristen sehingga tidak bisa menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi para Pemohon, bahkan ditakutkan akan jatuh kedalam perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu zina, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *ke-mashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan ltsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014, di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Mulyadi, Lc., M.H.I., Ketua Majelis, H.Fitriyadi, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA. masing-masing Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Fitriyadi, S.H.I.,
Hakim Anggota II,

Mulyadi, Lc., M.H.I.,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 16 Februari 2017

Panitra,

Dra. Wahdatan Nusrach